

**ANALISIS TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK  
DESA SUMBER BRANTAS KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU**

**SKRIPSI**

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana”**

**ADMINISTRASI PUBLIK**



**DISUSUN OLEH:  
Adrianus Kondo  
2018210033**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

Bantuan publik adalah kumpulan individu, kelompok, dan organisasi yang menawarkan jaringan lingkungan berbagai bentuk bantuan publik untuk mengatasi masalah mereka. Organisasi adalah kekuatan kuat lainnya yang secara konsisten berusaha untuk memajukan tujuan jaringan lingkungan sesuai dengan hukum. Kompetensi utama yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka memenuhi kewajibannya adalah melayani daerah sekitar sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan resmi yang telah ditetapkan, dan organisasi pendukung masyarakat yang luar biasa harus dibentuk di setiap distrik. Karena kesederhanaan sangat penting dalam organisasi, kelompok yang didanai warga harus mematuhi kriteria kesederhanaan yang sama di mana pun sehingga informasi dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Untuk menghargai manfaat dari bantuan lokal yang luar biasa, realisme juga merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pakar publik diharapkan untuk mengikuti pedoman dan instruksi yang diberikan dengan cara ini. Investigasi ini dilakukan di Kota Sumber Brantas Bumiaji, Kota Batu, dan menampilkan metode yang sangat menyentuh dan tanggap di mana ilmuwan mempresentasikan temuan untuk menjelaskan kondisi sempurna di lokasi penelitian.

Kesimpulan penelitian adalah Kota Sumber Brantas mengutamakan kesederhanaan organisasi bagi warganya. di mana laporannya terbuka dan dapat diakses secara efektif, isinya jelas dan terorganisir, pesan bantuannya sederhana, dan konstruksi otoritatifnya jelas. Meskipun memiliki tempat kerja yang memadai dan landasan yang kuat, hipotesis peneliti bahwa pejabat pemerintah daerah justru berbicara dengan dialek lokal daripada bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa yang seharusnya digunakan dalam administrasi yang baik, kemudian menjadi faktor penyalahgunaan. Menurut para profesional di Kota Sumber Brantas, secara umum diakui ketersediaan bantuan sangat besar dan fasilitas serta kantor yang memberikan layanan bantuan kepada masyarakat sudah lebih dari cukup.

**Kata Kunci: Analisis, Transparansi, Pelayanan Publik**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bantuan publik adalah pengembangan individu, kelompok, dan organisasi yang memberikan bantuan publik kepada jaringan lokal untuk mengatasi masalah mereka. Organisasi adalah kekuatan kuat lainnya yang secara konsisten berusaha untuk memajukan tujuan jaringan lingkungan sesuai dengan hukum. Menurut Perda Nomor 23 Tahun 2014, badan pemerintah harus memprioritaskan mendukung masyarakat lokal dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, operasi pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan persyaratan resmi yang ditetapkan, dan organisasi pendukung masyarakat yang luar biasa harus dibentuk di setiap kabupaten.

Saat ini banyak kekhawatiran tentang bagaimana mengontrol kekuasaan pemerintah agar dapat memberikan pilihan kepada masyarakat miskin untuk menangani masalah-masalah lingkungan, terutama yang melibatkan korespondensi resmi pemerintah seperti surat dan sejenisnya. Hal ini ditunjukkan dengan rasa ketidakpuasan terhadap situasi saat ini, yang dapat menimbulkan persepsi ahli publik yang kurang baik. Karena tanggung jawab utama ahli publik adalah untuk membantu masyarakat dalam menentukan kesederhanaan implementasi kebijakan, penting bagi mereka untuk memiliki hubungan yang sama dengan ahli pemerintah sipil lingkungan yang

bertanggung jawab untuk memberikan jenis bantuan terbuka ini. Spesialis materi pelajaran dapat berkolaborasi (Ratminto dan Atik, 2014:36).

Karena transparansi sangat penting dalam bisnis, organisasi yang mendukung orang harus mematuhi standar transparansi di mana informasi dapat dipahami oleh masyarakat umum. Untuk menghargai manfaat dari bantuan lokal yang luar biasa, realisme juga merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pakar publik diharapkan untuk mengikuti pedoman dan instruksi yang diberikan dengan cara ini.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Masyarakat Perkotaan, kota adalah kesatuan provinsi khusus yang memiliki kewenangan dan batasan wilayah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan melayani kepentingan lingkungan pada pengemudi lokal yang berdekatan. Tugas Kota termasuk menyelesaikan proyek-proyek pemerintah daerah dan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada warga kota. Dwiyanto (2008) menyarankan tiga pedoman untuk mengevaluasi realisme. Langkah pertama dalam prakarsa bantuan publik harus transparan tentang kondisi, biaya, dan waktu penyelesaian yang diantisipasi agar pemerintah daerah dapat berfungsi. Agar penerima manajemen mendapat manfaat dari Sistem Kerja Standar (SOP), mereka harus, secara keseluruhan, bersikap adil. Ketiga, semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen kebijakan harus cukup mendasar dan sederhana untuk dipahami oleh masyarakat umum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan alasan tersebut di atas, berikut ini adalah bagaimana masalah penelitian ini disusun:

1. Bagaimana tingkat Kelurahan Sumber Brantas Bumiaji Kota Batu Analisis Transparansi Pelayanan Publik dalam hal transparansi?
2. Apa yang menjadi penghambat dan pendukung transparansi pelayanan publik di Desa Sumber Brantas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, topik dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana analisis transparansi pelayanan publik Desa Sumber Brantas Bumiaji Kota Batu.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Berikut ini adalah manfaat khas dari pemeriksaan ini:

1. Bagi peneliti:  
Dapat memberikan pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan transparansi bantuan publik di pemerintah daerah.
2. Bagi Universitas:  
Mempelajari pelaksanaan kebijakan dan berkonsentrasi pada administrasi terbuka sebagai bahan evaluasi Dewan, sejauh mana pelaksanaan program pendidikan terhadap permasalahan implementasi kebijakan lulusan.
3. Bagi Pemerintah:

Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pesannya, terutama terkait dengan akses warga negara Indonesia terhadap bantuan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes. 2009. Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwiyanto, Agus. (2008). *Mewudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Harsono.2011. Etnogafi Pendidikan sebagai desain penelitian kualitatif. Solo:UMS
- Jawahir. 2015. *Kualiatas penyelenggaraan pertahanan dalam persfektif Administrasi Publik*. Jurnal Administrasi Publik, Vol (3) No.12
- Kristianten.2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong. 2011. Metodologi Penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya
- Miles dan Huberman. 2007. Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mantja. 2008. Etnogafi, Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan dan Manajemen Pendidikan. Malang: Elang Mas
- Ernesta 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5 (1)
- Ratminto, dan Atik S. Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptuan Penetapan standar pelayanan minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman. 2019. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jurnal Refomasi, Vol (9) No.2
- Sinambela, Lijan Poltak. 2018. *Reformasi pelayanan Publik*. Penerbit PT Bumi Aksara.
- Sabarno. 2017. Memandu Otonomi Daerah menjaga kesatuan bangsa. Jakarta: Sinar Grafika
- Satori. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2015. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Tanjung, A.H. 2013. Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual pendekatan teknis sesuai PP No. 71/2010. Alfabeta
- <https://www.yumpu.com/keputusan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-63-tahun-2003>. Diakses Kamis 20 April 2023
- <https://www.jipp.undp.org/undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik>. Diakses Kamis 20 April 2023
- <https://artanengsisianipar.wordpress.com/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa/> Diakses Kamis 20 April 2023
- <https://peraturan.bpk.go.id/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/> Diakses Kamis 20 April 2023
- <https://www.desarupe.web.id/tupoksi-perangkat-desa-menurut-permendagri-nomor-6-tahun-2016> Diakses Kamis 20 April 2023